

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT
DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN BAHAN BAKU
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
DI KABUPATEN LANGKAT**

T E S I S

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen Agribisnis (M.MA)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh :

FREDDY TOIMBY LIMBONG

NPM. 071802035

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Kabupaten Langkat.

Nama : Freddy Toimby Limbong.

NPM. : 071802035.

Menyetujui :

Pembimbing I ,

Pembimbing II ,



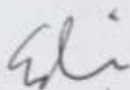
Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS.



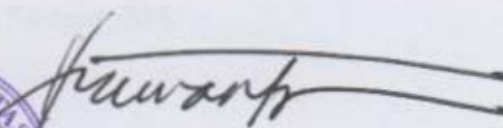
Ir. Abdul Rahman, MS.

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Agribisnis.

Direktur,



Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS.



Drs. Heri Kusmanto, MA.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 18 April 2009.

Nama : Freddy Toimby Limbong.

NPM. : 071802035.



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Ir. Zulheri Noer, MP.

Sekretaris : Drs. H. Miftahuddin. M.BA.

Penguji I : Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar. MS.

Penguji II : Ir. Abdul Rahman, MS.

Penguji Tamu : Ir. Erwin Pane, MS.

RINGKASAN

FREDDY TOIMBY LIMBONG. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis – Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Analisis Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Kabupaten Langkat, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS. , Anggota : Ir. Abdul Rahman, MS.

Kapasitas produksi industri yang lebih tinggi dari pada suplai kayu, produksi kayu hutan dalam negeri yang menurun dan di sisi lain terjadinya peningkatan kebutuhan bahan baku kayu, baik untuk industri maupun pertukangan, maka penyediaan kayu hutan alam tidak akan mampu memenuhi permintaan konsumen, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap harga kayu di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Selain itu, pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan dan juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam rangka pengembangan hutan rakyat, sehingga kebutuhan pasokan bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di wilayah Kabupaten Langkat dapat terpenuhi dan berkelanjutan.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Langkat. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive random sampling, dimana responden untuk penelitian ini ditentukan secara sengaja. Responden terdiri dari eksekutif dan *stakeholder* dari tingkat kabupaten yang dianggap memahami permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat. Jumlah responden untuk inventarisasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) orang, sedangkan jumlah responden untuk pembobotan faktor-faktor Strategis Eksternal dan Internal dan untuk analisis QSPM ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor strategis lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat terdiri dari 3 faktor terbesar pengaruhnya yang dapat dijadikan sebagai peluang (*opportunities*) meliputi (1) Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan yang lestari, (2) Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan yang melibatkan rakyat di sekitar hutan, (3) Suasana sosial, politik dan ekonomi yang mendukung kebijakan pengembangan hutan rakyat dan ada 3 faktor yang merupakan ancaman (*threats*) meliputi (1) Kemitraan yang belum terbentuk antara industri berbahan baku kayu dan petani hutan rakyat, (2) Masih adanya perbedaan persepsi tentang hutan rakyat dan teknis pengelolaannya, (3) Belum ada ketertarikan investasi dan pemberian modal (kredit modal). Sedangkan faktor-faktor strategis lingkungan internal yang berpengaruh terhadap pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*).

Faktor-faktor strategis yang menjadi kekuatan adalah (1) Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan petani, (2) Pengembangan hutan rakyat berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi rakyat, (3) Dukungan kebijakan nasional dan regional terhadap pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat. Faktor-faktor strategis yang merupakan kelemahan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat adalah (1) Pembinaan dari lembaga / instansi terkait belum optimal, (2) Sumber daya manusia (SDM) Petani dan kelembagaannya yang masih belum baik, (3) Belum intensifnya sosialisasi tentang pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil analisis QSPM dapat ditentukan sebanyak 5 prioritas strategi jangka pendek dan menengah yang akan direkomendasikan untuk dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat adalah (1) Strategi perluasan hutan rakyat, intensifikasi silvikultur dan pemanfaatan hutan rakyat, (2) Strategi pemantapan batas dan peruntukan kawasan hutan rakyat, (3) Strategi peningkatan kualitas SDM, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta peningkatan peranan lembaga penunjang, (4) Strategi sosialisasi terhadap hutan rakyat kepada seluruh stakeholder terkait, (5) Strategi peningkatan peran rakyat melalui penguatan kelembagaan petani. Sedangkan untuk strategi jangka panjang terdapat 5 prioritas yang direkomendasikan untuk dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat meliputi (1) Strategi fasilitasi pola kemitraan antara industri kayu dan kelembagaan petani hutan rakyat, (2) Strategi pengembangan sumber dana alternatif / lembaga keuangan non bank untuk pengembangan hutan rakyat, (3) Strategi pembentukan kemitraan antara investor dengan kelembagaan petani, (4) Strategi fasilitasi penyediaan modal bagi petani / kelembagaan petani melalui kredit program pemerintah, dan (5) Strategi pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : (1) Unruk mengimplementasikan strategi prioritas yang telah ditentukan, sebaiknya didahului dengan sistem perencanaan yang terpadu dan komprehensif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan berbasaskan kepada tujuan dan maksud pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat, (2) Mengingat pentingnya peranan hutan rakyat sebagai salah satu pemasok kebutuhan kayu di masa yang akan datang, maka pelaksanaan prioritas strategi yang telah dipilih pada prinsipnya harus dilaksanakan secara terpadu karena saling terkait untuk mendukung pengembangan hutan rakyat, khususnya di Kabupaten Langkat.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karuniaNya sehingga karya tesis ini berhasil diselesaikan, guna menyempumakan tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen Agribisnis pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Agribisnis Universitas Medan Area - Medan dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DI KABUPATEN LANGKAT”**.

Kapasitas produksi industri yang lebih tinggi dari pada suplai bahan baku kayu bulat, produksi kayu hutan dalam negeri yang menurun dan di sisi lain terjadinya peningkatan kebutuhan bahan baku kayu, baik untuk industri maupun pertukangan, mengakibatkan penyediaan kayu yang berasal hutan alam tidak akan mampu memenuhi permintaan konsumen. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap harga kayu di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Selain itu, pembangunan hutan rakyat juga dapat berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan dan juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam rangka pengembangan hutan rakyat di wilayah Kabupaten Langkat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing, Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS. dan Ir. Abdul Rahman, MS. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat beserta staf yang telah memfasilitasi penulis selama proses pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayahanda St. W. Limbong, BA dan Ibunda M. br. Pardede serta seluruh keluarga tercinta atas segala doa dan dorongan selama penulisan tesis ini. Di samping itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Civitas Akademika pada Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya rekan-rekan mahasiswa Angkatan V dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas seluruh bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis membuka diri dan mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, agar tesis ini dapat disempurnakan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

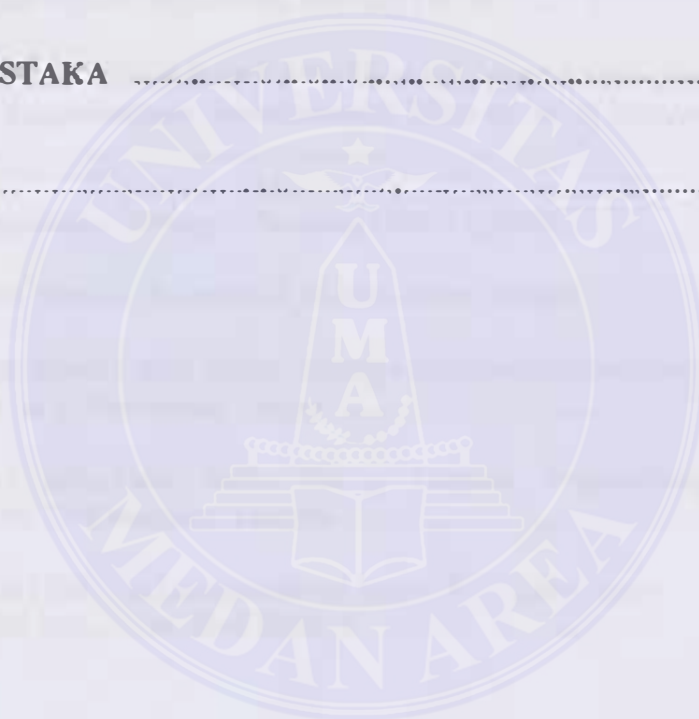
Medan, April 2009.

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Hutan dan Kehutanan	10
2.2. Makna Hutan Secara Konseptual	14
2.3. Industri Kayu	20
2.4. Prospek Industri Kayu	21
2.5. Pengertian Hutan Rakyat	22
2.6. Konsep Manajemen Strategi	26
2.7. Kerangka Konseptual Penelitian	29
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2. Jenis dan Sumber Data	30
3.3. Teknik Pengambilan Sampel	30
3.4. Pengumpulan dan Analisis Data	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Langkat	40
4.2. Inventarisasi Faktor-Faktor Strategis Eksternal dan Internal	44
4.3. Formulasi Strategi	72
4.4. Prioritas Strategi	74
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jenis dan Sumber Data Primer.....	31
2. Jenis dan Sumber Data Sekunder.....	32
3. Daftar Responden Untuk Inventarisasi Faktor- faktor Strategik Eksternal dan Internal	33
4. Daftar Responden Untuk Pembobotan Faktor- faktor Strategis Eksternal dan Internal serta untuk Analisis <i>QSPM</i>	35
5. Format Penentuan Bobot Faktor-faktor Strategis yang berpengaruh terhadap pengembangan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Langkat.....	34
6. Format Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).....	39
7. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat.....	41
8. Urutan Skor Bobot Faktor-faktor Strategis Eksternal Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Langkat.....	46
9. Urutan Skor Bobot Faktor-faktor Strategis Internal Pengembangan Hutan Rakyat Di Kabupaten Langkat.....	56
10. Rekapitulasi Nilai Total attractiveness score (TAS) dan Urutan Prioritas dari setiap Formulasi Strategi.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	29
2. Model Matriks TOWS (<i>Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths</i>)	37
3. Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat Tahun 2000-2007....	43
4. Grafik Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Tahun 2000-2007.....	44
5. Matriks <i>TOWS</i> Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Langkat...	73



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pembobotan Faktor-Faktor Startegik Eksternal.....	89
2. Pembobotan Faktor-Faktor Startegik Internal	90
3. Perhitungan Nilai Total Attractivenesses Score (TAS)	92
4. Data dan Kapasitas Izin Produksi IPHILIK di Kabupaten Langkat Tahun 2008	97
5. Realisasi Perolehan Kayu Bulat dan Produksi Kayu Olahan di Kabupaten Langkat Tahun 2004 s/d. Tahun 2008	100



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangibile* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi. Keberadaan hutan ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprojo, 2000). Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibolehkan mengubah fungsi utamanya.

Perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat, hal ini berkaitan dengan semakin terasanya kekurangan hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik hasil kayu sebagai kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Selain itu pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehutanan dengan memperhatikan aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat telah menjadi landasan yang utama. Bahkan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna (Pasal 70 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999). Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan yang harus didorong oleh Pemerintah adalah pembangunan hutan rakyat. Di samping karena keterbatasan pasokan kayu dari hutan alam dan distribusinya yang kerap menjadi persoalan menyebabkan harganya menjadi tinggi, sehingga perlu mencari sumber pasokan alternatif, dan salah satunya adalah pembangunan hutan rakyat.

Maksud dan tujuan pengembangan hutan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna bahan baku kayu untuk industri, kayu pertukangan dan kayu energi
3. Terpeliharanya kondisi tata air dan lingkungan yang baik, khususnya lahan milik rakyat.
4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara.
5. Memberdayakan masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., 2001. Hutan dan kehutanan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Awang, S. A. dkk, 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kehutanan Masyarakat. CV. Debut Press. Yogyakarta
- Bambang, 1995. Hutan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. PT. Gramedia, Jakarta
- Craig, J.C. dan Robert M. Grant. 1993. Manajemen Strategi PT.Gramedia. Jakarta
- David. L.1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPF. Yogyakarta.
- David, F.R. 2002. Managemen Strategis Konsep. Alexander Sindoro. Penerjemah Agus Widyantoro. Penyunting PT. Prenhallindo. Jakarta.
- Hardjosoediro (1980) Pemilihan Jenis Tanaman Reboisasi dan Penghijauan Hutan Alam dan Hutan Rakyat. Lokakarya Pemilihan Jenis Tanaman Reboisasi. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta. Dalam : San Afri Awang, dkk, 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kehutanan Masyarakat. CV. Debut Press. Yogyakarta
- Ichwandi, L, 1996. Nilai Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Jaffar, E. R., 1993. Pola Pengembangan Hutan Rakyat sebagai Upaya Peningkatan Luasan Hutan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Propinsi DIY. Makalah Pertemuan Persaksi Propinsi DIY 17 Juli 1993, Yogyakarta. Dalam : San Afri Awang, dkk, 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kehutanan Masyarakat. CV. Debut Press, Yogyakarta
- Jauch, RL. dan RW, Glueck. 1995. Manejemen Strategik dan Kebijakan Perusahaan. Alih Bahasa oleh Murad, Sitanggung, AR.H., dan Wibowo, H. Erlangga. Jakarta
- Pearce and Robinson. 1997. Manajemen Strategik Formulasi Implementasi dan Pengendalian. Alih Bahasa oleh Agus Mulyawan. PT. Binarupa Aksara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, tanggal 8 Januari 2007. Jakarta.

- Rangkuti, F. 2003. *Analisi SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saragih . B. 1993. Agro industri suaktu sektor yang memimpin dalam *PJPT II*.
- Simon, H., 1995. Hutan Jati dan Kemakmuran. Aditya Media, Yogyakarta. Dalam : San Afri Awang, dkk. 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Pustaka Kebutanan Masyarakat. CV. Debut Press, Yogyakarta
- Simon, H., 2004. Membangun Desa Hutan : Kasus Dusun Sambiroto. UGM Press, Yogyakarta
- Soekartawi, 1998. *Menoleh kembali Sektor Pertanian*. PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003. *Agribisnis, Teori & Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta
- Sumardjo. J. Sulaksana dan W. A. Darmono, 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Soemarwoto, O. dkk. 1992. Melestarikan Hutan Tropika : Permasalahan, Manfaat, dan Kebijakannya. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999, Jakarta.